

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

A. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah

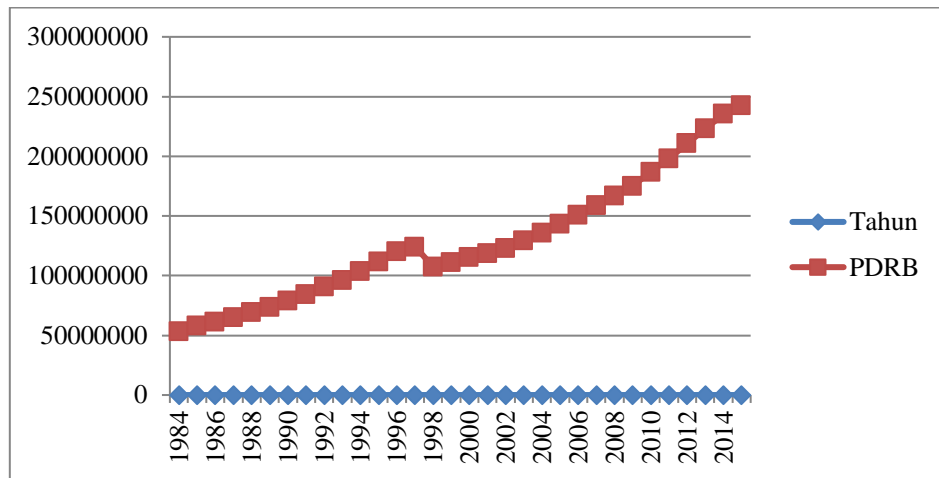
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu berusaha agar pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dapat tumbuh dengan maksimal serta menunjukkan *progress* yang baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan nilai PDRB di wilayah tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya serta mengambil berbagai macam kebijakan agar kestabilan ekonomi makro tetap terjaga dengan baik, hal ini biasanya tercermin dari nilai PDRB yang baik pula sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pemulihan ekonomi. Akan tetapi keinginan untuk dapat mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik tidak selamanya berjalan dengan mudah setiap tahunnya, adapun hal tersebut terbukti dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.1
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah Tahun
1985-2015

Th	PDRB (000.000)	Th	PDRB (000.000)	Th	PDRB (000.000)
1985	Rp57.879.652	1996	Rp120.414.450	2007	Rp159.083.139
1986	Rp61.384.336	1997	Rp124.158.838	2008	Rp167.023.583
1987	Rp64.995.102	1998	Rp107.478.507	2009	Rp175.188.026
1988	Rp69.123.314	1999	Rp111.161.114	2010	Rp186.995.481
1989	Rp73.588.392	2000	Rp115.168.019	2011	Rp198.270.118
1990	Rp78.737.956	2001	Rp118.816.400	2012	Rp210.848.424
1991	Rp84.374.068	2002	Rp123.038.541	2013	Rp223.099.740
1992	Rp90.651.628	2003	Rp129.166.462	2014	Rp235.390.477
1993	Rp96.178.401	2004	Rp135.789.036	2015	Rp242.566.743
1994	Rp103.430.848	2005	Rp143.051.872		
1995	Rp111.545.220	2006	Rp150.681.441		

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Pada Tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah selalu mengalami *trend* kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 31 tahun PDRB Jawa Tengah terus mengalami kenaikan, hanya saja ketika tahun 1998 tercatat penurunan PDRB dari tahun sebelumnya yakni tercatat sebesar Rp107.478.507 . Angka tersebut tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 1997 sebesar Rp124.158.838 .



Sumber : Badan Pusat Statistik, Data diolah (2016)

Gambar 4.1

Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penurunan angka PDRB Jawa Tengah pada tahun 1998 dikarenakan krisis moneter global yang terjadi pada era itu. Akan tetapi setelah itu, di tahun 1999 PDRB dapat naik kembali dan terus menunjukkan arah yang positif hingga tahun 2015. Kerjasama dan tim pengendali moneter serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat perekonomian kembali bangkit pasca krisis moneter di tahun 1998.

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah

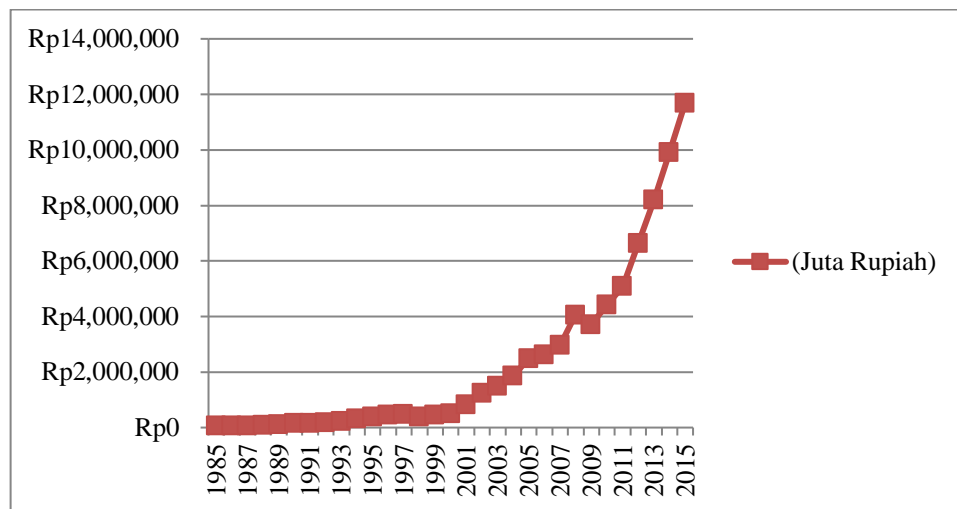
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima di setiap daerah setiap tahunnya, perolehannya didapatkan dari sektor-sektor unggulan yang berada pada daerah tersebut. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah mengatur tentang PAD, didalamnya terdapat peraturan tentang pelimpahan sebagai wewenang pemerintah daerah untuk mengatur serta menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja ketika terjadi krisis global tahun 1998 menyebabkan PAD provinsi Jawa Tengah sempat mengalami penurunan. Pada tahun 1997 PAD Jawa Tengah yakni sebesar Rp479.912 (Juta Rupiah), namun karena adanya krisis global menyebabkan PAD turun menjadi Rp381.207 (Juta Rupiah) di tahun 1998. Akan tetapi setelah adanya orde reformasi potensi perekonomian daerah dapat kembali naik lagi pada posisi Rp468.596 (Juta Rupiah) di tahun 1999. Hal ini terus tercermin dan menunjukkan arah yang positif setiap tahunnya, PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp11.696.822 (Juta Rupiah).

Tabel 4.2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Tahun	PAD (000.000)	Tahun	PAD (000.000)	Tahun	PAD (000.000)
1985	Rp59.865	1996	Rp460.084	2007	Rp2.970.031
1986	Rp68.220	1997	Rp479.912	2008	Rp4.057.776
1987	Rp77.198	1998	Rp381.207	2009	Rp3.716.053
1988	Rp89.780	1999	Rp468.596	2010	Rp4.417.869
1989	Rp115.311	2000	Rp505.660	2011	Rp5.088.713
1990	Rp150.889	2001	Rp832.261	2012	Rp6.629.308
1991	Rp171.001	2002	Rp1.241.735	2013	Rp8.212.801
1992	Rp192.152	2003	Rp1.494.936	2014	Rp9.916.358
1993	Rp241.138	2004	Rp1.865.404	2015	Rp11.696.822
1994	Rp318.965	2005	Rp2.491.396		
1995	Rp391.939	2006	Rp2.632.456		

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016)



Sumber : Data Sekunder, Diolah.

Gambar 4.2.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah

C. Perkembangan Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah

Perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah, dimana dalam upaya pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah diperlukan investasi yang terus meningkat dan harus dicukupi dengan memperhatikan kemampuan daerah sendiri dan kemampuan nasional. Untuk itu diperlukan pengerahan dana, tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana dari luar.

Nilai realisasi investasi di Jawa Tengah merupakan besarnya realisasi investasi dari proyek yang telah disetujui oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk melihat nilai realisasi investasi penanaman modal di Jawa Tengah selama periode tahun 1985-2015 dapat dilihat sebagai berikut:

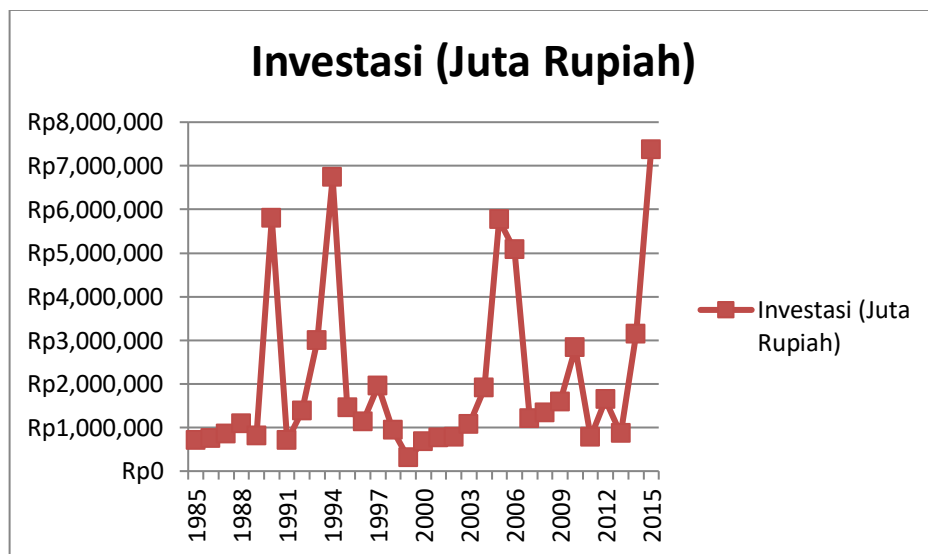
Tabel 4.3

Investasi di Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Tahun	Investasi	Tahun	Investasi	Tahun	Investasi
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

	(000.000)		(000.000)		(000.000)
1985	Rp697.361	1996	Rp1.123.518	2007	Rp1.191.875
1986	Rp737.795	1997	Rp1.953.197	2008	Rp1.336.341
1987	Rp848.629	1998	Rp940.944	2009	Rp1.579.000
1988	Rp1.076.869	1999	Rp300.574	2010	Rp2.825.395
1989	Rp798.500	2000	Rp666.078	2011	Rp775.829
1990	Rp5.799.281	2001	Rp756.172	2012	Rp1.633.952
1991	Rp695.397	2002	Rp777.117	2013	Rp859.088
1992	Rp1.370.566	2003	Rp1.062.159	2014	Rp3.142.280
1993	Rp2.984.209	2004	Rp1.900.000	2015	Rp7.369.689
1994	Rp6.729.769	2005	Rp5.756.776		
1995	Rp1.447.678	2006	Rp5.067.314		

Sumber: Badan Pusat Statistika (2016)



Sumber: Badan Pusat Statistika. Diolah (2016)

Gambar 4.3

Perkembangan Investasi di Jawa Tengah

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama periode tahun 1985-2015 selalu berfluktuatif, dimana mulai tahun 1985 sampai tahun 1988 terus menunjukkan

peningkatan jumlah investasi yang ditanamkan di Jawa Tengah, kemudian berfluktuasi hingga tahun 1998, lalu investasi anjlok sebagai akibat dari krisis moneter yang mana investasi di tahun 1999 hanya sebesar Rp 300,574 (Juta Rupiah). Pada tahun 2000 sentimen positif investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah mulai menunjukkan respon positif, dimana pada tahun tersebut angka investasi menyentuh Rp666.078 (Juta Rupiah). Kemudian pada tahun selanjutnya hingga tahun 2006 investasi PMDN di Jawa Tengah terus mengalami fluktuasi, hingga di tahun 2007 kembali mengalami keanjlokkan investasi dikarenakan melambatnya perekonomian dunia dan resesi yang menyebabkan krisis sehingga berdampak pula terhadap iklim investasi di Indonesia. Namun perlahan sentimen positif para investor terhadap iklim investasi kembali memberikan arah yang positif, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya investasi PMDN khususnya di Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan, hanya saja terjadi fluktuasi di tahun 2011 dan 2013, akan tetapi di tahun 2014 dan 2015 investasi PMDN terus meningkat, hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp7.369.689 (Juta Rupiah).

D. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Tengah

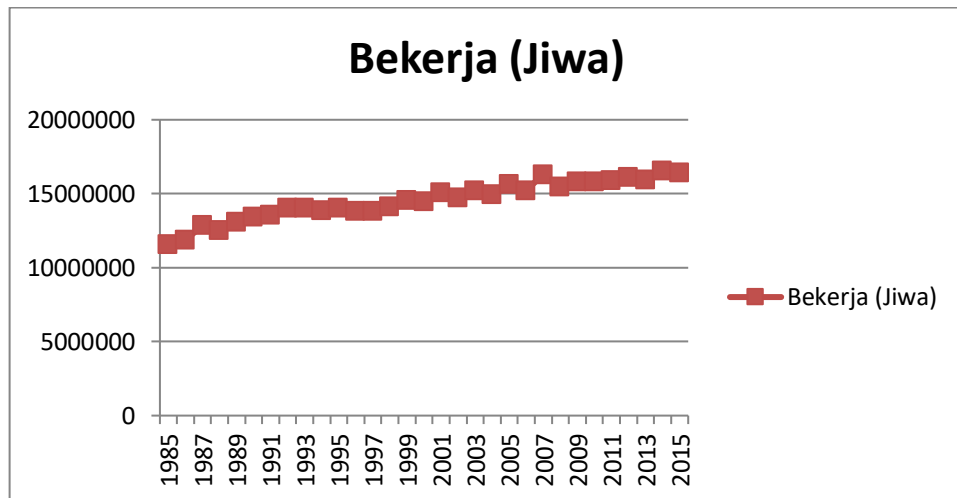
Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja, dimana dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan memperbanyak jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja di suatu daerah merupakan faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semakin banyak jumlah angkatan kerja yang bekerja maka tenaga kerja tersebut semakin produktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan output daerah. Tenaga kerja yang bekerja merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi, karena merekalah yang melaksanakan pembangunan ekonomi.

Tabel 4.4
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Jawa Tengah tahun 1985-2015

Tahun	Bekerja (Jiwa)	Tahun	Bekerja (Jiwa)	Tahun	Bekerja (Jiwa)
1985	11.553.916	1996	13.841.255	2007	16.304.058
1986	11.871.565	1997	13.805.930	2008	15.463.658
1987	12.866.665	1998	14.117.828	2009	15.835.382
1988	12.504.593	1999	14.566.119	2010	15.809.447
1989	13.106.608	2000	14.491.222	2011	15.916.135
1990	13.424.784	2001	15.066.542	2012	16.132.890
1991	13.544.104	2002	14.751.088	2013	15.964.048
1992	14.022.669	2003	15.196.265	2014	16.550.682
1993	14.047.137	2004	14.930.097	2015	16.435.142
1994	13.850.929	2005	15.655.303		
1995	14.062.056	2006	15.210.931		

Sumber: Badan Pusat Statistika (2016)



Sumber: Badan Pusat Statistika. Diolah (2016)

Gambar 4.4

Pertumbuhan Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami fluktuasi, diawali dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1987 terus mengalami peningkatan, kemudian dua tahun selanjutnya mengalami fluktuasi, lalu mulai pada tahun 1989 mengalami kenaikan jumlah angkatan yang bekerja hingga tahun 1993. Fluktuasi tersebut terus terjadi hingga tahun 2010, mulai tahun 2011 terus mengalami peningkatan, hanya saja ketika tahun 2013 terjadi penurunan jumlah angkatan yang bekerja, akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 terus mengalami peningkatan hingga akhirnya mencapai angka 16.435.142 jiwa yang bekerja di Jawa Tengah.

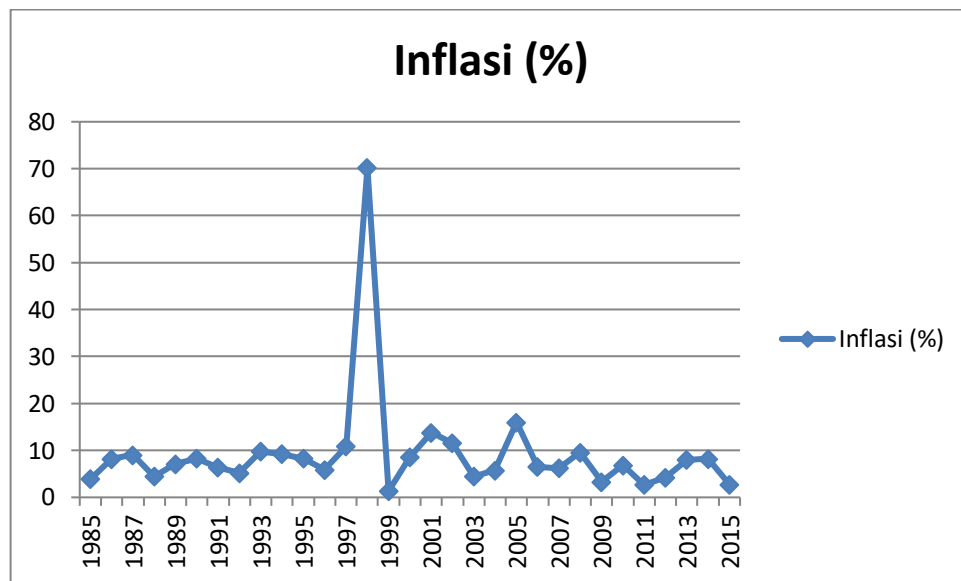
E. Perkembangan Laju Inflasi di Jawa Tengah

Inflasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. laju inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat khususnya bagi pekerja yang berpenghasilan tetap. Meningkatkan suku bunga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang, menurunkan gairah menabung dan berinvestasi, serta dapat menghambat usaha peningkatan ekspor, yang pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. sebaliknya, inflasi yang rendah (terkendali) akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan juga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.5
Inflasi di Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)	Tahun	Inflasi (%)
1985	3,94	1994	9,23	2003	4,45	2012	4,24
1986	8,18	1995	8,27	2004	5,75	2013	7,99
1987	9,02	1996	5,89	2005	15,97	2014	8,22
1988	4,44	1997	10,88	2006	6,5	2015	2,73
1989	7,12	1998	70,28	2007	6,24		
1990	8,27	1999	1,33	2008	9,55		
1991	6,35	2000	8,57	2009	3,32		
1992	5,21	2001	13,81	2010	6,88		
1993	9,77	2002	11,52	2011	2,68		

Sumber: Badan Pusat Statistika (2016)



Sumber: Badan Pusat Statistika. Diolah (2016)

Gambar 4.5
Perkembangan Laju Inflasi di Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa laju inflasi di Jawa Tengah terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dari tahun 1985 hingga tahun 2015 terus mengalami fluktuasi, hanya ketika terjadi krisis moneter di tahun 1998 mengakibatkan laju inflasi tak terkendali hingga 70,28% dan di tahun 1999 laju inflasinya sangat rendah yakni sebesar 1,33%. Adapun terjadi laju inflasi yang cukup tinggi yakni diatas 10% terjadi pada tahun 1997, 2001, 2002, dan 2005. Pada lima tahun terakhir yakni 2010-2015 cukup berfluktuasi namun masih dapat dikendalikan yakni dibawah 10%.

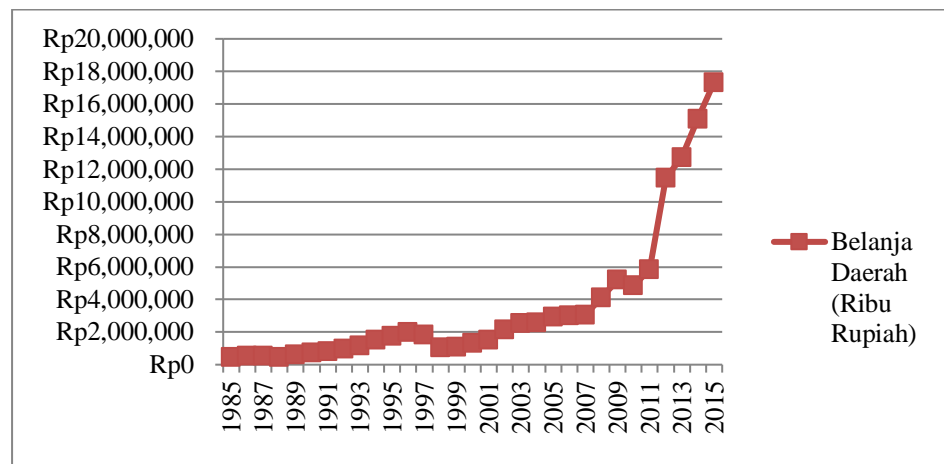
F. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Jawa Tengah

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ialah belanja karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk melihat realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Tahun	Belanja Daerah (000)	Tahun	Belanja Daerah (000)	Tahun	Belanja Daerah (000)
1985	Rp471.328	1996	Rp1.996.322	2007	Rp3.039.630
1986	Rp522.641	1997	Rp1.829.943	2008	Rp4.104.562
1987	Rp530.509	1998	Rp1.031.083	2009	Rp5.200.113
1988	Rp469.626	1999	Rp1.085.446	2010	Rp4.852.026
1989	Rp619.987	2000	Rp1.318.173	2011	Rp5.846.515
1990	Rp722.831	2001	Rp1.508.026	2012	Rp11.446.844
1991	Rp814.605	2002	Rp2.133.153	2013	Rp12.724.776
1992	Rp954.686	2003	Rp2.554.384	2014	Rp15.086.065
1993	Rp1.164.195	2004	Rp2.572.554	2015	Rp17.337.686
1994	Rp1.506.751	2005	Rp2.936.311		
1995	Rp1.771.089	2006	Rp3.028.855		

Sumber: Badan Pusat Statistika (2016)



Sumber: Badan Pusat Statistika. Diolah (2016)

Gambar 4.6
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Berdasarkan gambar dan tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1985 setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja di tahun 1988 sempat terjadi penurunan realisasi belanja daerah yakni menjadi Rp 469.626 (ribu rupiah), kemudian di tahun 1998 sebagai akibat atau dampak dari adanya krisis moneter global menyebabkan realisasi belanja daerah menurun kembali menjadi Rp 1.031.083 (ribu rupiah), padahal pada tahun sebelumnya yakni pada tahun 1997 realisasi belanja daerah telah mencapai Rp 1.829.943 (ribu rupiah). Kemudian pada tahun 2010 juga terjadi penurunan realisasi belanja daerah menjadi Rp 4.852.026 (ribu rupiah) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2009 telah mencapai Rp 5.200.113 (ribu rupiah). Namun secara keseluruhan realisasi belanja daerah untuk Provinsi Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya.

